

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017

Hasna Lathifa, Haryanto ¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local own-source revenue and capital expenditure on the financial performance of local government on regencies/cities in Central Java Province 2013-2017. This research is important to do because it can provide information about the effect of local own-source revenue and capital expenditure on the financial performance of local government on regencies/cities in Central Java Province.

This study was conducted by documentation method by collecting data obtained through BPK representative of Central Java Province. The data used is secondary data, which consists of the budget realization report in Central Java Province. This research use Multiple Linear Regression Method in SPSS software.

The results showed that: (1) local own-source revenue has positive effect on the financial performance of local government and (2) capital expenditure has has positive effect on the financial performance of local government.

Keywords : local own-source revenue, capital expenditure, financial performance of local government.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu upaya guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini pemerintah pusat tidak dapat mengawasi pembangunan daerah secara menyeluruh sehingga kewenangannya dilimpahkan terhadap pemerintah daerah untuk mengurus sendiri kepentingan-kepentingan daerahnya (Anazodo dkk., 2016). Maka dari itu perlu diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan melaksanakan sendiri urusan pemerintahan dan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Supaya proses pembangunan daerah dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu pendanaan dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah perlu mengelola keuangan daerah secara mandiri. Keuangan daerah yang dapat dikelola dengan baik mencerminkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerahnya baik pula. Pengelolaan keuangan daerah tertentu dapat tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat digunakan untuk menciptakan peraturan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah (Lucky, 2013).

Menurut Mahmudi (2010) sumber keuangan daerah ada 2 jenis, yaitu sumber keuangan daerah yang berasal dari penerimaan daerah yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan dan sumber keuangan daerah yang berasal dari upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh pemerintah yang hasilnya akan didapat beberapa tahun kemudian. Upaya tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur yang diindikasikan sebagai salah satu kegiatan belanja modal.

Salah satu masalah keuangan daerah yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah ketergantungannya pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan daerah tersebut kurang

¹ Corresponding author

mampu dalam menggali sumber-sumber pendapatan potensial (Kurniawati dkk., 2017). Sumber pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah mencerminkan kemandirian suatu daerah karena pemerintah daerah dapat menggunakan PAD lebih bebas tidak seperti pendanaan yang berasal dari sumber eksternal (Kurniawati dkk., 2017). Maka dari itu pemerintah daerah harus mengupayakan kenaikan pendapatan dari daerah setempat agar dapat memperbesar keuangan daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah yang semakin bertambah dapat mengindikasikan kinerja keuangan yang baik. Selain itu, pendapatan bisa menjadi dana yang dibutuhkan oleh pemerintah guna membiayai kegiatannya (Mohammed dkk., 2015).

Upaya-upaya tertentu juga telah dilakukan pemerintah daerah melalui kegiatan belanja modal seperti pembangunan infrastruktur yang juga ikut berperan untuk menghasilkan sumber pendapatan daerah. Ayinde dkk. (2015) mengatakan belanja modal pemerintah yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada proyek-proyek tertentu guna meningkatkan dan memajukan kemudahan hidup dan kenyamanan warga negaranya untuk jangka waktu yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah berupa fasilitas umum seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung dan bangunan, penyediaan transportasi umum, dan sebagainya. Hal ini tentu dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bojanic (2013) produktivitas inilah yang pada akhirnya menentukan arah di mana berbagai jenis pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja modal dapat mendorong investasi yang berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah di masa yang akan datang. Pertumbuhan pendapatan daerah yang terus bertambah mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah daerah baik.

Kinerja keuangan merupakan ukuran pencapaian dalam aspek keuangan termasuk pendapatan dan belanja daerah, maka kinerja keuangan dapat tercermin dari kenaikan pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah (Lucky, 2013). Namun kenyataannya alokasi belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah jauh lebih sedikit dibandingkan belanja operasi, seperti yang dialami oleh Provinsi Jawa Tengah. Faktor permasalahan tersebut bisa jadi disebabkan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap penggalan potensi-potensi pendapatan asli daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memang cenderung lebih rendah dibandingkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

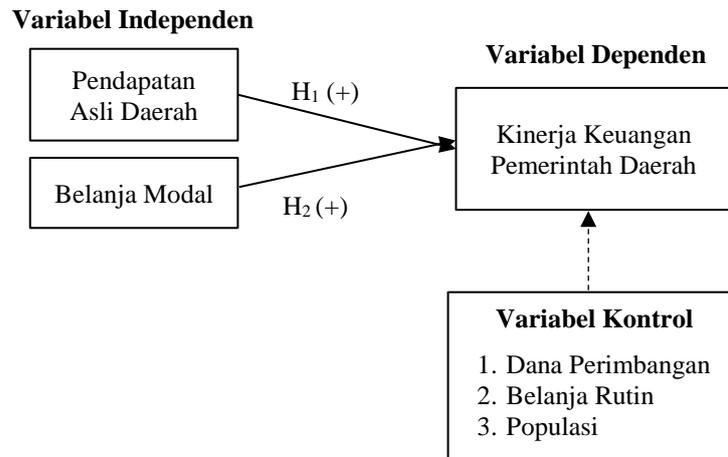
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Semakin bertambahnya pendapatan asli daerah maka akan berdampak pada kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah yang bertambah dapat mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Begitu pula dengan belanja modal, dengan banyaknya pembangunan infrastruktur maka diyakini bahwa beberapa tahun ke depan sumber keuangan yang didapat pemerintah daerah akan semakin besar. Apabila pertumbuhan pendapatan daerah meningkat maka mencerminkan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik.

Kerangka pemikiran ini menjelaskan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen yang dipakai adalah pendapatan asli daerah dan belanja modal, variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, dan variabel kontrolnya adalah dana perimbangan, belanja rutin, dan populasi. Berikut disajikan diagram kerangka pemikiran penelitian:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan pendapatan suatu daerah dengan cara dipungut sesuai dengan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat (Antari dan Sedana, 2018). Apabila pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat maka berdampak pada kenaikan kinerja keuangan pula. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julitawati dkk. (2012) yang mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu pula dengan hasil penelitian Darwanis dan Saputra (2014) dan Wenny (2012) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Belanja modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya pembangunan infrastruktur. Pembangunan tersebut diyakini akan menambahkan pemasukan daerah meskipun dalam beberapa tahun kemudian. Adanya peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Astiti dan Mimba (2016) menyatakan bahwa jika pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertambah banyak maka akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat semakin meningkat (Andirfa, 2016). Hasil penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) dan Puspitasari dkk. (2015) juga menunjukkan bahwa belanja modal dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dinamakan variabel dependen. Variabel dependen penelitian adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran yang telah terukur. Mulyani dan Wibowo (2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat

pencapaian aktivitas pada bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan perundang-undangan selama periode anggaran. Kinerja keuangan pada pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan pada APBD, salah satunya rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan diyakini dapat mengukur seberapa kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari periode ke periode berikutnya. Berikut cara mengukur rasio pertumbuhan pendapatan daerah:

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{\text{pendapatan daerah } t - \text{pendapatan daerah } t-1}{\text{pendapatan daerah } t-1}$$

Variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel lain merupakan pengertian dari variabel independen. Terdapat dua variabel independen yang diterapkan pada penelitian. Berikut merupakan penjelasan variabel-variabel tersebut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Data tersebut didapatkan dari BPK Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Adapun cara mengukur variabel pendapatan asli daerah sebagai berikut:
 $\text{PAD} = \text{pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah}$.

2. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah biaya yang dikeluarkan guna memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Belanja modal dapat berupa belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Data tersebut diperoleh dari BPK Provinsi Jawa Tengah dalam satuan rupiah. Cara mengukur variabel belanja modal yaitu:
 $\text{Belanja modal} = \text{belanja tanah} + \text{belanja peralatan dan mesin} + \text{belanja gedung dan bangunan} + \text{belanja jalan, irigasi, dan jaringan} + \text{belanja aset tetap lainnya}$.

Variabel kontrol pada penelitian ini antara lain dana perimbangan, belanja rutin, dan populasi. Dana perimbangan diukur dengan total dari realisasi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Belanja rutin diukur dengan total dari realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Populasi diukur dengan jumlah populasi yang tinggal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang datanya diperoleh dari BPS Jawa Tengah.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Kriteria sebagai patokan menentukan populasi antara lain:

1. Pemerintah daerah yang mempublikasikan pendapatan asli daerah dan belanja modal pada Laporan Realisasi APBD.
2. Pemerintah daerah yang rutin melaporkan Laporan Realisasi APBD dari tahun 2013-2017.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh yang mana seluruh populasi penelitian dijadikan sampel. Rentang waktu penelitian 5 tahun karena merupakan tahun pelaporan keuangan terbaru dan diharapkan output dari penelitian akan lebih sesuai dengan kondisi yang terjadi di Jawa Tengah.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon_i$$

Keterangan:

Y = kinerja keuangan pemerintah daerah

α = konstanta regresi

β_1 dan β_2 = koefisien regresi variabel independen

$\beta_3, \beta_4,$ dan β_5 = koefisien regresi variabel kontrol

X₁ = pendapatan asli daerah

X₂ = belanja modal

X₃ = dana perimbangan

X₄ = belanja rutin

X₅ = populasi

ϵ_i = koefisien error atau tingkat kesalahan pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota pada tahun 2013-2017. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh yang mana seluruh populasi dijadikan sampel. Namun terdapat outlier yang menyebabkan sampel penelitian tidak baik. Maka berikut adalah rincian sampel penelitian:

Tabel 1
Daftar Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah Sampel
1	Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017	175
2	Outlier	(5)
3	Jumlah sampel penelitian	170

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari total 175 objek penelitian, sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini hanya 170 sampel.

Statistik Deskriptif Variabel

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan guna memberikan gambaran pada data yang disajikan. Alat statistik deskriptif menganalisis data berupa nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan *standard deviation*.

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	170	95.192.786.97	648.091.381.0	257.581.393.1	104.438.607.0
		2	96	34	42
Belanja Modal	170	51.980.727.01	843.986.253.4	303.656.666.3	141.419.582.4
		9	60	87	01
Kinerja Keuangan	170	-0,03	0,28	0,12	0,05
Dana Perimbangan	170	101.216.057.8	1.941.145.933	1.081.231.625	343.369.209.9
		23	.885	.430	14

Belanja Rutin	170	460.019.271.0	2.360.680.782	1.257.984.914	356.798.850.3
		66	.998	.393	02
Populasi	170	119.879	1.796.004	943.134	395.876
Valid N (listwise)	170				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa dari 170 sampel yang diteliti nilai minimum pada variabel pendapatan asli daerah sebesar Rp 95.192.786.972, nilai maksimum sebesar Rp 648.091.381.096, nilai rata-rata sebesar Rp 257.581.393.134, dan standar deviasi sebesar Rp 104.438.607.042. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi data yang dihasilkan relatif kecil karena nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya.

Untuk variabel belanja modal, nilai minimumnya sebesar Rp 51.980.727.019, nilai maksimum sebesar Rp 843.986.253.460, nilai rata-rata sebesar Rp 303.656.666.387, dan standar deviasi sebesar Rp 141.419.582.401. Nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, artinya variasi data yang dihasilkan relatif kecil.

Untuk variabel kinerja keuangan, nilai minimumnya sebesar -0,03, nilai maksimumnya sebesar 0,28, nilai rata-rata sebesar 0,12, dan standar deviasi sebesar 0,05.

Untuk variabel dana perimbangan, nilai minimumnya sebesar Rp 101.216.057.823, nilai maksimum sebesar Rp 1.941.145.933.885, nilai rata-rata sebesar Rp 1.081.231.625.430, dan standar deviasi sebesar Rp 343.369.209.914. Nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, artinya variasi data yang dihasilkan relatif kecil.

Untuk variabel belanja rutin, nilai minimumnya sebesar Rp 460.019.271.066, nilai maksimum sebesar Rp 2.360.680.782.998, nilai rata-rata sebesar Rp 1.257.984.914.393, dan standar deviasi sebesar Rp 356.798.850.302. Nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, artinya variasi data yang dihasilkan relatif kecil.

Untuk variabel populasi, nilai minimumnya sebesar 119.879, nilai maksimum sebesar 1.796.004, nilai rata-rata sebesar 943.134, dan standar deviasi sebesar 395.876. Nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, artinya variasi data yang dihasilkan relatif kecil.

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji hipotesis merupakan pengujian yang wajib dilakukan guna menunjukkan simpulan dari variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji regresi linier berganda dapat diterapkan untuk menguji data guna menghasilkan simpulan mengenai hipotesis yang terdiri dari variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen telah didukung atau ditolak. Berikut disajikan tabel hasil uji hipotesis:

Tabel 3
Uji Hipotesis

<i>Model</i>	<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>Coefficients</i>		<i>Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	.102	.017		6.119	.000
PAD	.024	.007	.330	3.557	.000
Belanja Modal	.027	.012	.232	2.182	.031
Dana Perimbangan	-8.207E-14	.000	-.584	-3.721	.000
Belanja Rutin	3.651E-14	.000	.270	1.548	.124
Populasi	4.444E-8	.000	.365	2.636	.009

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, uji regresi linier berganda menunjukkan t hitung sebesar 3,557, koefisien variabel yang positif sebesar 0,024, dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien variabel positif maka terdapat hubungan signifikan yang positif pada variabel. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis dan penelitian Antari dan Sedana (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa pendapatan asli daerah dapat memberikan kontribusi pertumbuhan pendapatan daerah. Jika pendapatan daerah mengalami peningkatan maka terjadi peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut serupa dengan penelitian Julitawati dkk. (2012) yang mengatakan bahwa peningkatan PAD akan mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menekan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain agar PAD meningkat setiap tahunnya.

Adanya pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menandakan bahwa pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Apabila pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat maka pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, uji regresi linier berganda menunjukkan t hitung sebesar 2,182, koefisien regresi yang positif sebesar 0,027, dan tingkat signifikansi sebesar 0,031. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien variabel positif maka terdapat hubungan signifikan yang positif pada variabel. Maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis dan penelitian Andirfa dkk. (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut mengatakan bahwa dengan adanya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat semakin tinggi. Hal tersebut juga serupa dengan penelitian Astiti dan Mimba (2016) yang mengatakan bahwa pengalokasian belanja modal berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal yang semakin tinggi diharapkan dapat memperoleh sumber-sumber keuangan yang semakin besar.

Adanya pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menandakan bahwa belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Apabila sumber-sumber keuangan daerah tersebut meningkat maka pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk meneliti pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan.
3. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.

4. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Koefisien determinasi yang dihasilkan tergolong sangat rendah menandakan masih banyaknya faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Data yang digunakan adalah data sekunder yang masih terdapat kesalahan dalam memasukkan data berupa angka-angka.

Saran

Saran yang disampaikan pada penelitian antara lain:

1. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan belanja modal secara merata di masing-masing kabupaten/kota supaya pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lebih banyak lagi karena masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dan menggunakan rasio keuangan daerah yang lain.

REFERENSI

- Anazodo, Rosemary O., Chinyeaka Justine Igbokwe-Ibeto, dan Barisua Barry Nkomah. 2016. Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. *Arabian Journal of Business and Management Review*, Vol. 5, No. 10, h. 38–54.
- Andirfa, Mulia, Hasan Basri, dan Shabri A. Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, Vol. 5, No. 3, h. 30–38.
- Antari, Ni Putu Gina Sukma dan Ida Bagus Panji Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 2, h. 1080–1110.
- Astiti, Desak Nyoman Yulia dan Ni Putu Sri Harta Mimba. 2016. Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14, No. 3, h. 1924–1950.
- Ayinde, Kayode, John Kuranga, dan Adewale F. Lukman. 2015. Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co-Integration, Error Correction Mechanism and Combined Estimators Analysis Approach. *Asian Economic and Financial Review*, Vol. 5, No. 6, h. 858–867.
- Bojanic, Antonio N. 2013. The Composition of Government Expenditures and Economic Growth in Bolivia. *Latin America Journal of Economics*, Vol. 50, No. 1, h. 83-105.
- Darwanis dan Ryanda Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, h. 183–199.
- Darwis, Erstelita Tria Ramadhani. 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, h. 1–23.

- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Greiling, Dorothea. 2005. Performance Measurement in The Public Sector: The German Experience. *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 54, No. 7, h. 551-567.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 1, h. 53-64.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, Vol. 3, No. 4, h. 303-360.
- Julitawati, Ebit, Darwanis, dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 1, h. 15–29.
- Kemenkeu. 2012. "Belanja Modal dan Pengeluaran Investasi Pemerintah" <http://anggaran.kemenkeu.go.id>. Diakses 1 Oktober 2018.
- Kurniawati, Siti, H. Busaini, dan Sri Pancawati M. 2017. Determinants of Financial Performance: Study of Local Governments in West Nusa Tenggara. *International Conference and Call for Papers*, h. 1536–1560.
- Lucky, Dihan. 2013. Analysis of the Effect of Regional Financial Performance to Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 4, No. 19, h. 7–18.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mohammed, Abba, Bawa Bello Ahmed, dan Aliyu Modibbo Salihu. 2015. Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria. *Journal of Arts, Science & Commerce*, Vol. 6, No. 3, h. 67–77.
- Mulyani, Sri dan Hardiyanto Wibowo. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen*, Vol. 15, No. 1, h. 57–66.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 1, No. 2, h. 1–14.
- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Among Makarti*, Vol. 7, No. 13, h. 83-112.
- Puspitasari, Ni Luh Putu Lindri, Made Pradana Adiputra, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2015. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No. 1, h. 1–10.



Wenny, Cherrya Dhia. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol. 2, No. 1, h. 39–51.